

**EFEKTIVITAS KINERJA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN  
PEDESAAN (SP-3) ANGKATAN IX TAHUN 1997/1998  
DI TIRTOHARGO, KRETEK, BANTUL, DIY**

*Oleh:*

*Hj. Sumirah Agus Subardan dan FX. Sudarsono*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program SP-3 terhadap kader wirausaha dan pembangunan masyarakat pedesaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja SP-3. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan mengambil setting di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan alasan SP-3 di lokasi ini memperoleh penghargaan pada waktu dilakukan evaluasi. Dengan model studi kasus, subyek penelitiannya adalah SP-3, informannya para tokoh masyarakat, para pamong desa, dan instansi Kecamatan serta beberapa warga masyarakat. Data dikumpulkan dengan peneliti sebagai instrumen, dibantu dengan observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah pola pikir deduktif dengan silogisme hipotetis.

Kesimpulan penelitian adalah "Kinerja SP-3 dinyatakan kurang efektif. Hal ini terlihat pada: (1) Dampak terhadap kader wirausaha: (a) diri SP-3 tidak dapat menjadi kader wirausaha (b) masyarakat khususnya pemuda tidak ada yang meniru atau melanjutkan kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan SP-3. (2) Dampak terhadap pembangunan: (a) dampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat desa Tirtohargo tidak ada. (b) dampak terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Desa Tirtohargo tidak ada. Temuan yang menarik bahwa SP-3 masuk pada banyak segmen kehidupan masyarakat yang berarti SP-3 akseptabel. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja SP-3 adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: motivasi, kemampuan dan etos kerja SP-3. Faktor internal ditemukan mendukung terhadap efektivitas kinerja SP-3. Faktor eksternal meliputi: lingkungan fisik/geografis, biaya hidup yang diterima SP-3, sikap masyarakat terhadap kehadiran SP-3. Ditemukan bahwa hanya biaya hidup yang diterima SP-3 yang berpengaruh terhadap tidak efektifnya kinerja SP-3. Biaya hidup tersebut ternyata jumlahnya relatif sedikit untuk ukuran sarjana.

## **Pendahuluan**

Di negara yang sedang giat membangun peranan generasi muda sangat penting. Berbagai kebijaksanaan ditempuh oleh pemerintah untuk menjawab urgensi tersebut, salah satunya adalah dengan program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3), yang telah dilaksanakan sejak awal Pelita V sampai sekarang. Program ini dipandang tepat karena beberapa alasan. *Pertama*, 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan termasuk pemudanya. *Kedua*, terjadinya angka pengangguran yang demikian besar, memerlukan pemikiran untuk mengatasinya. Angka pengangguran tahun 1998 mencapai 8,6 juta jiwa (5% dari jumlah total penduduk Indonesia) dengan rincian jumlah angkatan kerja yang tidak terserap 2,7 juta jiwa, pengangguran terbuka 4,4 juta jiwa dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) 12,3 juta jiwa, yang angka ini akan terus bertambah. Tahun 1994 saja, menurut Biro Pusat Statistik jumlah angkatan kerja lulusan PT baik Diploma maupun S1 sebanyak 2.520.395. Jumlah sarjana yang masih menganggur adalah 500.000 orang, sementara jumlah sarjana baru yang diwisuda setiap tahunnya rata-rata 70.000 orang. Menyadari akan tingginya tingkat pengangguran terdidik terutama dari perguruan tinggi dan kebutuhan akan pionir pembangunan ekonomi di pedesaan yang semakin mendesak, maka lulusan PT harus dipandang sebagai aset dalam upaya pembangunan ekonomi pedesaan melalui SP-3.

SP-3 diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan di pedesaan, mereka dapat memanfaatkan potensi yang ada di pedesaan untuk diupayakan menjadi kegiatan yang produktif. Selanjutnya diharapkan agar para pemuda pedesaan mempunyai kemandirian dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pemuda pedesaan merupakan aset bangsa yang selalu harus dikembangkan sumber daya manusia dan iptek-nya. Pemuda pedesaan yang berkualitas adalah pemuda pedesaan yang bersikap maju, berpikir modern, produktif dan profesional. Jika kemandirian sangat berperan penting dalam membentuk pemuda pedesaan yang berkualitas. Dari kenyataan ini, peranan agen perubahan sangat dibutuhkan untuk membantu proses pengembangan sumber daya manusia yang optimal dari pemuda pedesaan.

Para sarjana diharapkan dapat berperan aktif dalam kondisi ini. Para sarjana sebagai orang terpelajar diharapkan mampu mengikis pengangguran di pedesaan dan ketimpangan pertumbuhan antara desa-kota. Sarjana tersebut

diharapkan mempunyai kemandirian, yang mampu merumuskan persoalan dan sekaligus dapat memecahkannya. Hal tersebut akan membantu anggota masyarakat mengubah dan mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan aspirasi yang pada gilirannya dapat dijadikan modal utama dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, dengan partisipasi aktif anggota masyarakat tersebut.

Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) diharapkan sebagai agen perubahan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di pedesaan, dan mampu membantu aparat pemerintah dan sekaligus menjadi wirausahawan. Hal ini sesuai pendapat Margono Slamet, yang disitir Gunawan Sumodiningrat 1988). SP-3 harus mampu membantu masyarakat maupun pemerintah setempat dalam mendinamisasikan perekonomian desa, merumuskan masalah, sekaligus memecahkan masalah yang ada. SP-3 diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator antara keinginan masyarakat setempat dengan program nasional, serta dapat menjadi kader wirausaha muda yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain.

Kenyataan yang ada pada masyarakat yang menjadi binaan SP-3 belum nampak adanya perubahan yang berarti, masih banyak yang belum sadar akan arti pembangunan, banyak pemuda yang pengetahuan dan ketrampilannya masih rendah, sehingga belum dapat memanfaatkan potensi desa untuk kesejahteraan, mereka hanya berperan sebagai konsumen saja. Banyak permasalahan di desa yang belum terpecahkan terutama yang paling erat dengan aspek sosial ekonomi masyarakat, sehingga menghambat pencapaian kesejahteraan sosial.

### **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak program SP-3 terhadap penciptaan lapangan kerja baik pada diri SP-3 maupun masyarakat ?
2. Bagaimana dampak program SP-3 terhadap pembangunan masyarakat desa?
3. Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas kinerja SP-3 ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak program SP-3 terhadap terciptanya lapangan kerja baik terhadap diri SP-3 dan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak SP-3 terhadap perubahan yang terjadi di pedesaan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja SP-3.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, dapat diperoleh strategi yang efektif pemberdayaan SP-3 agar kinerja SP-3 dapat efektif sehingga dapat menjadi masukan kepada pembuat keputusan dalam rangka penyempurnaan program, instansi terkait dalam melaksanakan program pembekalan calon SP-3 dan pembinaan serta pemantauan SP-3 di pedesaan dan menambah wawasan SP-3 dalam pelaksanaan tugas di pedesaan, serta dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

### **Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun atas dasar beberapa teori:

#### **1. Pembangunan Masyarakat Desa**

Sudjana (1996) berpendapat bahwa pengembangan masyarakat, pengembangan sosial, atau pembangunan masyarakat, mengandung arti sebagai upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah. Pelaksanaan pembangunan masyarakat dengan berwawasan lingkungan baik alam, sosial, maupun budaya. Pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk terjadinya: peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan serta terjabarnya kebijaksanaan dan program pembangunan nasional di masing-masing pedesaan, dengan menitikberatkan pada prakarsa masyarakat itu sendiri.

Pembangunan masyarakat merupakan upaya wajar yang didasarkan atas kebutuhan individual, masyarakat dan pemerintah serta potensi-potensi

yang tersedia atau dapat disediakan untuk kemajuan masyarakat. Pembangunan masyarakat desa sebagai suatu gerakan, artinya mengandung usaha sadar, sistimatis dan terarah yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari masyarakat dalam upaya merubah taraf kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Dalam pengertian tersebut anggota masyarakat, bersama-sama melibatkan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Jenis dan ragam kegiatan ditentukan atas dasar prakasa masyarakat itu sendiri, sedangkan peranan pihak luar dititik-beratkan pada upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membangun dirinya sendiri.

Pembangunan masyarakat desa mengandung makna sebagai suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif, dan bila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat. Tetapi apabila inisiatif ini tidak muncul maka dipergunakan teknik-teknik untuk menumbuhkannya.

Pembangunan masyarakat desa diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri desa yang warganya berpartisipasi aktif, mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi yang dimulai dari kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan dan dapat mengungkap minat dan kebutuhannya dengan bertumpu pada sumber daya, potensi yang berasal dari masyarakat mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

### *Prinsip dan Unsur Pembangunan Masyarakat Desa*

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri, dan kaderisasi.

*Prinsip keterpaduan* mengandung arti bahwa program atau kegiatan pengembangan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia, untuk memenuhi kepentingan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Perencanaan program dapat ditempuh dengan menggabungkan perencanaan dari masyarakat (*bottom-up planning*) dengan perencanaan dari atas yaitu pemerintah (*top down planning*) sehingga program pengembangan itu dapat berintegrasi dengan program pembangunan nasional dan regional. Pelaksanaan dan evaluasi program dilakukan oleh masyarakat dengan kemungkinan

memperoleh bantuan dari pihak lain baik dari pemerintah, para ahli maupun dari lembaga sosial masyarakat.

*Prinsip berkelanjutan* memberi arah bahwa pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus melainkan diselenggarakan secara bertahap, dan terus menerus menuju ke arah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menuntut adanya kegiatan lanjutan.

*Prinsip keserasian* mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan terasas yang dinyatakan oleh perorangan, masyarakat, lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian inipun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan kepentingan pemerintah.

*Prinsip kemampuan sendiri* menegaskan bahwa program pembangunan masyarakat disusun dan dilaksanakan berangkat dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Keikutsertaan pihak luar baik perorangan, lembaga maupun pemerintah ialah untuk memberi dorongan dan bantuan sehingga masyarakat dapat mendedayakan sumber-sumber yang mereka miliki secara efisien dan efektif.

*Prinsip kaderisasi* memberi isyarat bahwa pengelolaan dan kelanjutan program pembangunan masyarakat hanya akan terlaksana dengan baik apabila di masyarakat terdapat atau telah disiapkan kader-kader yang mempunyai sikap, pengetahuan, keterampilan dan aspirasi membangun untuk memenuhi kepentingan bersama dan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik.

Program atau kegiatan pengembangan masyarakat tidak dilakukan sekali tuntas, melainkan merupakan upaya yang berkelanjutan sehingga suatu kegiatan akan menumbuhkan kegiatan lain atau kegiatan berikutnya. Upaya ini bertopang pada kemampuan masyarakat yang diwujudkan dalam swadaya dan kegotongroyongan, kreativitas dan sikap inovatif dari masyarakat sendiri, sedangkan pihak pemerintah atau pihak lain berfungsi sebagai pendorong. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuannya. Sebagaimana dikemukakan Sudjono (1996) bahwa untuk menyelenggarakan, memperluas dan melanjutkan kegiatan pembangunan masyarakat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka kader pembangunan yang berasal dari masyarakat sendiri perlu disiapkan dan ditingkatkan baik jumlah maupun mutunya.

Pembangunan masyarakat meliputi seluruh aspek kehidupan warga masyarakat. Sejalan dengan lingkup pembangunan nasional pembangunan masyarakat menyangkut kegiatan- kegiatan pada sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta agama. Namun demikian sesuai dengan kemampuan masyarakat, penentuan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan masyarakat dalam sektor pembangunan tersebut dilakukan secara selektif, terpadu dan bertahap. Proses pemilihan dan penentuan program diorientasikan pada sektor yang menjadi titik kuat, pada umumnya berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Sektor yang menjadi titik kuat inilah dijadikan titik berat kegiatan, sedangkan sektor lain diintegrasikan pada sektor yang disebut pertama. Berangkat dari kegiatan pembangunan masyarakat yang mengandung titik kuat itu maka berbagai kegiatan pembangunan diharapkan akan lebih luas dan berkesinambungan. Selanjutnya Jim Ife (1997) menyatakan prinsip pembangunan ada 22: (1) *integrated development*, (2) *confronting structural disadvantage*, (3) *human rights*, (4) *sustainability*, (5) *empowerment*, (6) *the personal and the political*, (7) *community ownership*, (8) *self-reliance*, (9) *independence from the state*, (10) *immediate goals and ultimate visions*, (11) *organic development*, (12) *the pace of development*, (13) *External expertise*, (14) *community building*, (15) *process and outcome*, (16) *the integrity of process*, (17) *non violence*, (18) *inclusiveness*, (19) *consensus*, (20) *co-operation*, (21) *participation*, (22) *Defining need*.

Prinsip-prinsip dan unsur pokok pengembangan masyarakat tersebut mempunyai hubungan erat dengan sistem pendidikan. Apabila hubungan itu dikaji maka akan ditemukan suatu nilai bahwa pengembangan masyarakat itu sendiri merupakan kegiatan pendidikan dalam makna yang wajar dan luas. Makna wajar menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya dasar dalam membantu anggota masyarakat agar mereka dapat merubah dan mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta aspirasinya yang pada gilirannya dapat dijadikan modal utama dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya. Makna luas menunjukkan bahwa pendidikan itu sendiri merupakan kegiatan penting dalam setiap program pengembangan masyarakat.

### **Strategi Pembangunan Masyarakat Desa**

Sumitro Maskun (1993) menyatakan strategi pembangunan masyarakat desa adalah membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas dasar kemampuan dan kekuatan sendiri. Memang pembangunan masyarakat desa perlu didorong dengan proses motivasi, peningkatan partisipasi serta memperhatikan dan mempertimbangkan inspirasi dan motivasi masyarakat yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat sebagai suatu *partnership sistem* dalam pembangunan masyarakat desa dapat diciptakan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila dapat dihidupkan saling percaya antara perangkat pemerintah, lembaga atau organisasi sosial dan anggota masyarakat. Tahap penciptaan kondisi saling percaya dan pengertian inipun tidak dapat tumbuh dengan begitu saja, namun diperlukan suatu usaha yang membuat masyarakat memiliki pengertian tentang kebijaksanaan pemerintah dan kegiatan organisasi sosial, serta harus dilandaskan pada prinsip-prinsip saling solider, saling tergantung dan saling membutuhkan. Pandangan saling solider dan saling percaya, jujur dan lama kelamaan harus merupakan gaya hidup masyarakat dan corak implementasi para pelaksana dan birokrasi dalam menangani pembangunan masyarakat desa.

Strategi lainnya dalam pembangunan masyarakat desa ialah dengan membantu masyarakat agar dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri (*to help people to help themselves*). Oleh karena itu lebih mengutamakan sumberdaya insani, mementingkan aspek-aspek humanisme dan menghargai segi pandangan masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalahnya. Inisiatif masyarakat akan lebih baik, jika dihargai dalam usaha perencanaan dan strategi pembangunan di desanya. Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa harus dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Merekalah yang membangun, mereka yang memanfaatkan dan merekalah yang memiliki tentang keberhasilan-keberhasilan masyarakat desa. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan kalangan seperti tokoh-tokoh masyarakat, pegawai dan petani, kaum wanita, pemuda, anak-anak dan lain sebagainya. Semua itu adalah pelaku-pelaku dan sekaligus sasaran pembangunan masyarakat desa yang dapat menentukan maju tidaknya program-program dan perencanaan pembangunan tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi agar muncul

masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya. Pandangan Hofstede (terj. Ninik Astuti 1992) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh harus dibarengi dengan keinginan masyarakat desa sendiri untuk berkembang dan menjadi makmur, untuk memperbaiki taraf hidupnya agar hidup lebih baik dan bahagia, artinya masyarakat desa sendirilah yang memutuskannya sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian masyarakat sendiri akan mengetahui baik faktor pendukung dan penghambat yang ada di desanya sendiri. Dengan ini pula pengambilan keputusan dapat diambil secara bersama. Sebagaimana diketahui, menurut United Nations (dalam Hofstede, 1992: 3), kemampuan masyarakat untuk mencapai suatu keputusan mantap untuk kepentingan bersama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan.

### *Target Perubahan*

Sebagai target perubahan dalam pembangunan adalah, individu dan kelompok. Individu sebagai target perubahan berdasarkan atas pemikiran bahwa individu yang sudah berubah akan mempengaruhi tatanan sosial pada kelompok atau organisasi (Robert, H. Lauer 1993). Hal ini mengandung arti bahwa individu diubah tidak semata-mata agar menguntungkan individu itu sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih besar seperti untuk keuntungan kelompok atau organisasi. Keuntungan kelompok untuk meningkatkan hubungan antar kelompok, dan untuk pembangunan keseluruhan masyarakat. Bila individu yang diubah, mereka akan mempengaruhi hasrat untuk berubah dalam kesatuan masyarakat yang lebih luas. Meskipun individu yang menjadi target perubahan, sasaran antara yang akan dipengaruhi terlebih dahulu adalah selalu kelompok. Baik kelompok itu keluarga, kelas anak sekolah atau kelompok lainnya yang akan dijadikan sasaran.

Kelompok dapat dijadikan target maupun sebagai perantara perubahan apabila kelompok atau struktur sosial yang menjadi target diasumsikan perubahan suasana akan mempengaruhi perubahan individu. Nilai sikap dan perilaku individu akan diubah melalui perubahan struktur sosial atau melalui perubahan kelompok yang menjadi tempat individu berfikir dan bertindak. Baik individu maupun kesatuan sosial akhirnya akan berubah, tetapi pendekatan kelompok dan struktur sosial memilih kesatuan supra individu

sebagai target terdekat perubahan dengan keyakinan akan diikuti oleh perubahan individu (Robert H. Lauer 1993).

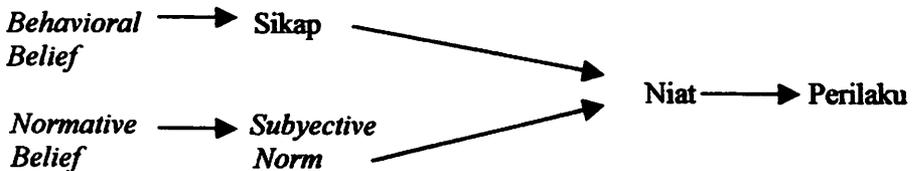
## 2. Teori Agen Perubahan

Usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang yang memelopori, menggerakkan, menyebarkan proses perubahan. Zulkarimein Nasution (1998) menyatakan, orang-orang yang melaksanakan tugasnya mewujudkan usaha perubahan, merupakan petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi (hal-hal baru, gagasan-gagasan baru, ide-ide baru) menurut arah yang diinginkan lembaga perubahan.

Agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua atau lebih sistem sosial yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang memelopori perubahan tadi dengan sistem sosial yang menjadi klien dalam usaha perubahan tersebut. Hal ini tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan yaitu sebagai:

1. Katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.
2. Pemberi pemecahan personal
3. Membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi.

SP-3 dalam memutuskan keinginan mereka untuk bertindak atau berlaku sebagai agen perubahan sosial dapat melalui proses dengan menggunakan teori Fishbein (1980) yang dikemukakan kembali oleh Zamroni (1988: 177) sebagai berikut:



Gambar 1. Teori Fishbein Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku.

Seorang sarjana dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan sebagai SP-3 ditentukan oleh niatnya. Niat yang ia miliki ditentukan oleh sikapnya terhadap kegiatan SP-3 dan oleh evaluasinya terhadap orang-orang penting yang memberi tahu tentang pentingnya SP-3 (*normative belief dan subyective norm*), pendapat orang tentang akibat atau manfaat menjadi SP-3 (*behavioral belief*).

Pada hakekatnya setiap kali berlangsung proses pembangunan terjadi interaksi antara agen pembangunan dengan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan (target) sebagai penerima. Hubungan antara dua pihak itu merupakan hubungan timbal balik. Agen pembangunan dituntut untuk menyesuaikan programnya dengan kebutuhan masyarakat sasaran (target), sebaliknya masyarakat sasaran, akan mau menerima program itu apabila hal tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Agen perubahan dalam upaya mendorong masyarakat sasaran mau menciptakan program pembangunan yang direncanakan, perlu menciptakan kondisi dasar yang sesuai. Kondisi dasar itu menurut Foster (1973) adalah sebagai berikut: 1) individu-individu yang terkena program harus menyadari bahwa ia membutuhkan perubahan dan mampu mengubahnya. Dengan demikian perubahan itu harus realistis; 2) individu-individu yang bersangkutan harus memiliki informasi yang jelas tentang cara pemenuhan kebutuhan itu; 3) individu tersebut harus memiliki sarana untuk mencapai kebutuhan; 4) tidak ada sangsi terhadap individu yang berinovasi.

Perilaku masyarakatpun jika dikaitkan dengan teori Fishbein di atas dapat dijelaskan bahwa mereka mau mengadopsi dan melakukan kegiatan pembangunan di desanya karena dipengaruhi oleh niat mereka. Niat yang ia miliki ditentukan oleh sikapnya terhadap pembangunan itu sendiri, misalnya terhadap manfaat positif yang dapat diperoleh dan oleh evaluasinya terhadap orang-orang penting yang memberi tahu tentang pentingnya pembangunan (*normative belief dan subyective norm*), pendapat orang tentang akibat atau manfaat (*behavioral belief*), misalnya dari para tokoh masyarakat dan dari para pamong desa atau dari pihak-pihak lain, misalnya pada waktu ada penyuluhan-penyuluhan.

Jadi, masyarakat sendiri hendaknya sadar bahwa upaya perubahan yang dilakukan oleh para agen perubahan termasuk SP-3 ini adalah demi kemanfaatan mereka sendiri. Dengan demikian terjadi titik temu antara usaha

*Efektivitas Kinerja Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Angkatan LX Tahun 1997/1998 di Tirtohargo, Kretek, Bantul, DIY*

perbaikan dari agen pembaharuan dengan keinginan masyarakat. Inilah prinsip yang perlu dikembangkan dalam pembangunan, yaitu keserasian antara *bottom up* dan *top down*.

*Efektivitas Kinerja SP-3*

Efektif diartikan berhasil guna, sedangkan efektivitas berarti hasil guna. Sesuatu berhasil guna manakala ada pengaruh atau akibatnya atau ada dampaknya, yaitu adanya perubahan. Kinerja adalah penampilan seseorang yang dapat diamati untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar. Jadi kinerja merupakan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang menunjukkan hasil belajar. Penilaian terhadap kinerja, biasanya disesuaikan dengan fungsi ternilai. Penilaian kinerja atau penampilan kerja SP-3 disesuaikan dengan tugas SP-3. Adapun tugas SP-3 sebagai kader wirausaha dan penggerak pembangunan masyarakat pedesaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja SP-3 adalah faktor intern (motivasi, kemampuan, etos kerja SP-3) dan faktor ekstern (lingkungan geografis, biaya hidup yang diterima SP-3 dan sikap masyarakat terhadap kehadiran SP-3)

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bermaksud mengevaluasi kinerja SP-3, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian evaluatif melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan digunakan metode pengamatan dan wawancara mendalam. Analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan subyek penelitian. Pemilihan dan penentuan setting pada kelompok SP-3 di Tirtohargo, Kretek Bantul Propinsi DIY. Subyek penelitian dipilih dengan mempergunakan teknik *purposive sampling*. Subyek penelitian terdiri atas: kelompok SP-3 berjumlah 5 orang, informan dari pemuda 4 orang, petani 6 orang, pedagang 4 orang, takmir masjid 6 orang, warga masyarakat 4

orang, instansi kecamatan 4 orang, LKMD 2 orang, PKK 3 orang, pamong desa 7 orang serta penyelenggara program 2 orang.

Untuk mengembangkan kriteria evaluasi sebagaimana disarankan Said Hamid Hasan (1988) yaitu pendekatan gabungan antara pendekatan proses dan pendekatan *fidelity*. Untuk mengetahui efektivitas kinerja SP-3 dilakukan dengan cara membandingkan keadaan desa Tirtohargo antara sebelum dan sesudah adanya program SP-3, tentang (1) usaha ekonomi produktif, yang diharapkan dapat melahirkan wirausaha, (2) penggerak pembangunan masyarakat yang diharapkan dapat membawa perubahan pola pikir masyarakat ke arah lebih maju, peningkatan pendapatan perkapita. Apabila dalam perbandingan tersebut ditemukan adanya peningkatan, maka kinerja SP-3 dinyatakan efektif, dan begitu juga sebaliknya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam pengumpulan data dengan *participant observation* dan *indepth interview*. Peneliti sekaligus sebagai instrumen utama dan berusaha sendiri mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan.

### **Simpulan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan (1) Kinerja SP-3 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada diri SP3 meliputi, motivasi, kemampuan dan etos kerja. Faktor eksternal meliputi, lingkungan fisik/geografis, imbalan biaya hidup SP-3 dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran SP-3. Motivasi sarjana untuk menjadi SP-3 bukan hanya didorong untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, namun ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk masyarakat. Mereka ingin mengaktualisasikan diri pada masyarakat. Kemampuan mereka telah memadai, mereka dari berbagai ilmu tetapi karena dapat bekerja secara sinergi yang dimungkinkan pogram kerja yang dibuat dapat berjalan. Etos kerja SP-3 ditemukan tinggi. Data di lapangan menunjukkan bahwa SP-3 mempunyai semangat dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal dalam mencapai suatu tujuan program cukup tinggi. Lingkungan fisik/geografis mendukung pelaksanaan tugas SP-3. Ternyata SP-3 tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik/geografis karena mempunyai banyak kesamaan dengan lingkungan fisik/geografis daerah asal SP-3. Program kerja SP-3 tidak

mengalami hambatan dengan keadaan lingkungan fisik/geografis. Imbalan biaya hidup yang diterima SP-3 jumlahnya relatif sedikit untuk ukuran sarjana dan mengakibatkan sangat menghambat pelaksanaan tugas. Sikap masyarakat yang dapat menerima kehadiran SP-3 dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SP-3. Masyarakat tidak memusuhi namun dapat menerima dengan ditunjukkan hubungan diantara keduanya yang sangat kental. SP-3 dapat menyesuaikan dengan masyarakat seperti masuk pada banyak segmen kehidupan. (2) Kinerja SP-3 tidak efektif namun SP-3 akseptabel dapat masuk pada banyak segmen kehidupan masyarakat. (3) Dampak SP-3 terhadap usaha ekonomi produktif yang mereka usahakan, kurang berhasil untuk SP3 menjadi kader wirausaha. Sedang masyarakat khususnya pemuda di desa tempat tugas SP-3 belum ada tanda-tanda meniru dan atau melanjutkan usaha SP-3. Dampak SP-3 terhadap pembangunan masyarakat, dilihat pada perubahan pola pikir masyarakat desa Tirtohargo belum tampak jelas, SP-3 belum mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Melalui budi daya penanaman cabe merah sistem mulsa plastik yang dengan segala rangkaian teknologinya masyarakat belum dapat menerimanya. Mereka tetap melaksanakan penanaman cabe merah secara tradisional yang telah dilakukan secara turun temurun. Dampak SP-3 terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Desa Tirtohargo belum ada. Pendapatan perkapita di Tirtohargo tidak mengalami kenaikan bila dikaitkan dengan adanya SP-3 di Tirtohargo. Bagaimana akan meningkat, jika usaha kegiatan produktif SP-3 tidak ditiru oleh masyarakat, sedang SP-3 sendiri kurang berhasil dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah Hanafi dan Muljanto Guntur Waseso. (1984). *Penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program kemasyarakatan*. Surakarta: Usaha Nasional.
- Azis M. Amin. (1978). *Tingkah laku kewiraswastaan di kalangan petani Aceh*. Prisma Oktober: 39.
- Bambang Tri Cahyono. (1983). *Teori dan praktek kewiraswastaan*. Yogyakarta: Liberty

- Brower, dkk. (1979). *Kepribadian dan perubahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Cesar, M. Mercado. (1994). *Langkah-langkah penelitian ilmu sosial, pedoman di dalam persiapan usulan penelitian dan manuskrip thesis*, Terjemahan C. Sardjono. Surakarta: Hapsara.
- Depdikbud. (1995). *SP-3 Desaku yang kucinta, Proyek penggerak pembangunan Ditjen Diklusepora, Proyek rencana penggerak pembangunan di pedesaan*. Jakarta: Dikluspورا.
- \_\_\_\_\_. (1998). *Peran SP-3 dalam membina kemandirian pemuda pedesaan melalui kewirausahaan sistem bertanam secara vertikal (Verikultur)*. Yogyakarta: Depdikbud.
- Direktorat Pembinaan Generasi Muda. (1996). *Pedoman umum SP-3*. Jakarta: Depdikbud.
- Fakhrudin. (1994). *Dimensi psikoedukatif kinerja kewiswastaan partisipan kursus tata kecantikan. Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta*. Jakarta: IKIP Jakarta.
- Gibson, James L., et.al. (1983). *Organisasi dan management*. Edisi IV. Jakarta: Erlangga.
- Hofsteede, W..M.F. (1992). *Proses pengambilan keputusan di empat desa Jawa Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ife Jim,(1997) *Community Development: Creating Community alternatives-vision analysis and praktice*, Addison Wesley Longmam Australia.
- Khairudin. (1992). *Pembangunan masyarakat; Tinjauan sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Koentjoro, dkk. (1990). *Laporan penelitian achievement motivation training dan kunjungan kerja terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Karangrejek dan Mojolegi Karangtengah Imogiri*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM .

*Efektivitas Kinerja Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Angkatan IX Tahun 1997/1998 di Tirtohargo, Kretek, Bantul, DIY*

- Mubyarto. (1997). *Kisah-kisah IDT penuturan 100 sarjana pendampingan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mulyono Joyomartono. (1990). *Perubahan kebudayaan dan masyarakat dalam pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Moleong, Hety J. (1993). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Lauer, Robert H. (1993). *Perspektif tentang perubahan sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robert H, Laurer. (1993). *Pespektif tentang perubahan sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robert K. Yin. (1995). *Studi kasus, desain dan metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo. (1999). *Sosiologi pedesaan, kumpulan bacaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Simanjuntak, B dan I.L. Pasaribu. (1990). *Membina dan mengembangkan generasi muda*. Bandung: Tarsito.
- Singarimbun, Masri. (1989). *Metode penelitian survai*, LP3ES. Jakarta: LSM
- Sudarsono, FX (1996). *Analisis Data kualitatif*, Yogyakarta, IKIP Yogyakarta.
- Sudjana, H.D. (1996). *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan Sejarah Perkembangan Pendukung Asas*. Bandung: Nusantara Press.
- Suharsimi Arikunto. (1998). *Penilaian program pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Somodiningrat Gunawan, (1988). *Membangun perekonomian rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zamroni, (1988). *Pengantar pengembangan teori sosial*. Jakarta: Proyek PLPTK Direktorat Jenderal Pendidikan.